

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara dengan bentuk pemerintahan yang demokrasi. Bentuk pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia terlihat dari sistem pemilihan umumnya. Pemilihan umum atau disingkat dengan Pemilu menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk berjalan pada sistem demokrasi dalam suatu negara tersebut.¹ Pemilu merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat, mereka yang memiliki hak pilih untuk memilih seseorang dalam menduduki jabatan politik tertentu. Pemilu dibagi menjadi 4 (empat) jenis penerapannya yaitu Pemilu pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau sering disingkat (PILPRES), Pemilu pada pemilihan anggota legislatif seperti (DPR, DPD, DPRD), Pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), dan Pemilu pada Pemilihan Kepala Desa atau sering disingkat dengan (PILKADES).

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan pemilihan yang dilaksanakan dengan azas luber yang artinya setiap warga negara yang memenuhi syarat wajib dan berhak memilih calon pemimpinnya secara langsung serta bebas dalam menentukan pilihannya dan rahasia ketika menentukan pilihannya yang dijamin oleh negara.² Dalam pelaksanaan proses

¹M.Alif Alwafi Akbar”Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi” Journal IPDN, diakses pada 12 Januari 2023, pukul: 12.00 WIB

²Risdiana Izzaty, Xavier Nugraha “Perwujudan Pemilu Yang Luber Jurdil Melalui Validitas Daftar Pemilihan Tetap”, Jurnal Suara Hukum, Vol.1, No.2 September 2019

Pilkada masih ditemukan hal-hal yang menjadi kendala penghambat seperti kurangnya partisipasi masyarakat terhadap Pemilu, masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran aturan pemilu dan kurangnya peran kepemimpinan lurah sebagai fasilitator dalam pemilihan pejabat daerah. Hal tersebut merupakan suatu kekurangan yang dimiliki ketika terselenggaranya pesta rakyat seperti Pilkada. Tentu secara langsung pengaruh tersebut di dasarkan pada kurangnya partisipasi masyarakat terhadap sosialisasi pentingnya partisipasi politik untuk turut serta dalam memilih calon pemimpin yang di dambakan masyarakat.

Tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kualitas calon pemimpin yang akan menduduki jabatan politik. Pilkada ini merupakan suatu bentuk nyata dari pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaannya semua lapisan masyarakat mempunyai hak pilih sendiri dalam pemilihan apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Partisipasi politik masih dianggap oleh masyarakat sebagai keikutsertaan dalam kegiatan pemilihan umum yaitu mencoblos pada pemilihan umum.³ Padahal jauh dari pada itu, partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dari proses pemilihan pejabat publik, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum, dilihat dari tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Sekalipun fokus utamanya lebih

³A Zarkasi, Dimas Rizal “*Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Jambi Periode Tahun 2018-2023 Di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi*”, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Vol.4, No.3, Juli 2020

luas tetapi abstrak, yang memiliki makna yaitu usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat.

Pemilihan kepala daerah secara langsung diyakini memiliki kapasitas yang memadai untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, sehingga masyarakat daerah memiliki kesempatan memilih secara bebas calon pemimpin daerahnya tanpa adanya tekanan, intimidasi, kekerasan politik, maupun penekanan dari jalur birokrasi. Hal ini dapat dikatakan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah momentum yang tepat munculnya berbagai varian preferensi dalam melakukan suatu tindakan atau perilaku politik masyarakat.

Dalam pemilihan kepala daerah peran pemimpin lokal adalah hal penting. Persoalan-persoalan dalam kasus pemilihan kepala daerah biasanya akan selalu bermuara pada para pemimpin lokal. Hal ini menunjukkan bahwa posisi strategis pemimpin lokal akan membawa pengaruh yang signifikan pada proses politik lokal. Salah satu pemimpin lokal tersebut adalah lurah yang merupakan pemimpin dalam organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Kelurahan dapat dikatakan sebagai ujung tombak keberhasilan proses sosialisasi politik.⁴

Dalam pembangunan di era otonomi daerah terlihat bahwa kelurahan juga memegang peranan penting dimana kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan. Dikatakan

⁴Hatta Ridho, *Peran Lurah Dalam Pemilihan Umum Legislatif Pemilihan Umum Presiden/ Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kota Tebing Tinggi*, Jurnal Ilmu Sosial Fakultas ISIPOL UMA, Vol.6, No.1

sebagai ujung tombak karena kelurahan berhadapan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu, kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut kepada pihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti.⁵ Disamping itu peran penting kelurahan diatas menjembatani program-program pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat.

Lurah sebagai bagian dari suprastruktur kekuasaan di daerah memegang posisi strategis dalam proses Pemilu dan Pilkada. Peran sentral lurah amat kental terasa sebagai fasilitator Pemilu, meskipun lurah bukanlah lembaga resmi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.⁶ Namun, keberadaan PPS hingga KPPS tidak bisa dilepaskan dari peran lurah sebagai fasilitator Pemilu dan Pilkada. Lurah juga berperan penting dalam beberapa aspek teknis fasilitator dalam logistik Pemilu, kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia, pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan membantu dalam menyediakan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Di samping peran tersebut, sebenarnya lurah juga mengemban tugas dan fungsi sebagai implementator dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan juga kemasyarakatan. Khususnya urusan kemasyarakatan, lurah wajib bermitra dengan lembaga kemasyarakatan, karena pada Undang-Undang Nomor 73

⁵Ibid

⁶Ibid, hal.54

Tahun 2005 tentang Kelurahan tercantum dalam pasal 12 ayat (3) salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan seperti pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat. Lurah dan aparat kelurahan wajib menegakkan netralitas sebagai ASN dan bertugas pada lembaga daerah yang nonpartisan. Lurah tidak boleh terjebak dalam keberpihakan terhadap kontestan Pemilu maupun Pilkada, meskipun kontestan tersebut memiliki hubungan struktural maupun primordial yang erat dengan lurah⁷.

Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah dipimpin oleh lurah yang bernama Abdul Salim yang telah menjabat dua periode kepemimpinannya, yaitu dimulai dari periode pertama Tahun 2016-2018 dan selanjutnya Tahun 2018-2023. Berdasarkan data dilapangan Kelurahan Eka Jaya merupakan kelurahan yang sering mendapatkan penghargaan dari Walikota Jambi contohnya pada Tahun 2019 Kelurahan Eka Jaya mendapatkan penghargaan kampung bantar terbanyak dikota Jambi. Pada Tahun 2023 pemerintah Kota Jambi secara resmi mengumumkan pemenang kategori kelurahan berprestasi dilingkup pemerintahan kota Jambi. Kelurahan Eka Jaya menjadi pemenang pertama kelurahan berprestasi se-kota Jambi. Meskipun situasi di Kelurahan Eka Jaya terlihat kondusif dan aman, tetap saja terdapat kendala-kendala yang dihadapi didalam fungsi kepemimpinan lurah yaitu karena masyarakat diwilayah tersebut lebih mendominasi kepada individualisme atau kesibukan pekerjaan mereka masing-masing yang berada di lingkup kawasan perkotaan.

⁷Firman, *Meritokrasi dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pengaruh Pilkada Langsung*, IJPA (The Indonesian Journal of Public Administrasion), Vol.3, No. 1, Juni 2017

Berkaitan dengan masyarakat pemilih, tipikal masyarakat kelurahan tidak jauh berbeda dengan masyarakat lainnya, yakni masih harus digerakan untuk berpartisipasi dalam Pemilu (*mobilized participation*). Kondisi reformasi politik yang masih awam dimata rakyat, maka partisipasi pemilih sebagai salah satu parameter keberhasilan demokrasi (pembangunan politik), masih harus dicermati dalam dikatomi kedewasaan politik pemilih.⁸

Dalam upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat harus berdasarkan pada analisis dan argumentasi yang kuat. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kebutuhan untuk membuat langkah strategis dalam peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, serta memberikan dampak penyempurnaan sistem pemilihan umum yang lebih baik kedepannya. Itu artinya argumentasi dan analisis yang timbul mesti berbasis pada metedologi atau kerangka pikir yang tepat untuk memahami dinamika partisipasi politik, serta didasari dengan konsep kepekaan kuat terhadap dinamika politik yang berkembang dalam wilayah administratif, ekonomi, serta sosial budaya masyarakat. Maka dari itu, fungsi kepemimpinan lurah dalam pilkada sangat penting adanya, fungsi kepemimpinan nya dapat menyukseskan pemilu karena bagaimana pun sebagai kepala wilayah atau lurah memiliki fungsi penting untuk mengajak masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam menyukseskan jalannya pemilu.

Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di Tahun 2018 digelar di 171 daerah di Indonesia, salah satu daerah yang mengikuti Pemilihan Kepala

⁸*Ibid*, hal 54

Daerah secara serentak yaitu Kota Jambi. Dari hasil rekapitulasi perhitungan jumlah DPT: 384.366, jumlah DPPH:708, jumlah PDTh:6910, dengan jumlah total pemilih sebanyak 391.984. Dari hasil perhitungan suara pemilihan tingkat partisipasi masyarakat keseluruhan 272.572 atau 63.53% (KPU Kota Jambi, 2018). Padahal target partisipasi masyarakat dalam politik nasional adalah sebesar 77,5%, seharusnya masyarakat kota harus memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi.⁹

Dari hasil penelitian terdahulu, ditemukan bahwa dalam tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Jambi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi ada pergeseran partisipasi menuju kearah yang lebih baik dibandingkan dengan Pilwakot pada periode sebelumnya. Pada Pilwakot 2013 partisipasi politik masyarakat Kota Jambi berjumlah 249.848 (60,19%), dari 415.068 suara yang terdaftar pada DPT. Sedangkan Pilwakot Tahun 2018 partisipasi masyarakat Kota Jambi berjumlah 272.572 (69,54%), dari 391.984 suara yang terdaftar (Data KPU Kota Jambi).¹⁰ Dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2018, tepatnya pada tanggal 27 Juni semua calon walikota dan wakil wali kota jambi di usul melalui partai politik atau gabungan partai politik sehingga menghasilkan dua pasang kandidat bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi yang terdiri dari:

⁹A Zarkasi, Dimas Rizal “*Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Jambi Periode Tahun 2018-2023 Di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi*”, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Vol.4, No.3, Juli 2020

¹⁰*Ibid*, hal.141

Tabel 1
Data Kandidat Calon Pemilihan Walikota Jambi beserta Partai Pendukung
Periode 2018-2023

No.	PASANGAN CALON PEMILIHAN WALIKOTA JAMBI PERIODE 2018-2023	PARTAI POLITIK PENDUKUNG	JUMLAH KURSI DI DPRD KOTA JAMBI
1.	Drs. H. Abdullah Sani,M.Pd.I Kemas Alfarizi Arsyad, S.E.	PDIP, PAN	11
2.	Dr. H. Syarif Fasha, M.E Dr. dr. H. Maulana, M.KM.	Golkar, Demokrat, gerindra, Hanura, PKB, PBB,PPP,PKPI,Nasdem	34

Sumber: KPU Jambi

Pilkada tersebut menjadi suatu pertarungan yang sangat sengit dikarenakan kedua pasangan calon tersebut adalah *incumbent* atau pertahana yakni Syarif Fasha yang merupakan Walikota Jambi periode 2013-2018 dan Abdullah Sani yang merupakan wakil dari Syarif Fasha yang sama-sama mencalonkan diri sebagai kandidat calon Walikota Jambi periode 2018-2023. Berdasarkan data tersebut, terdapat fenomena menarik dalam ajang Pilkada yaitu terdapat pertahana yang sebagian besar menang dalam setiap persaingan menduduki kursi orang nomor satu di daerah yang dimenangkan oleh Syarif Fasha dengan perolehan 147.652 suara.

Partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018 untuk pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Jambi sebesar 69,53% dari total DPT sebanyak 384.203 dan 651 DPT bagi penyandang disabilitas yang terbagi kedalam 1.103 TPS di Kota Jambi. Angka partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Jambi 2018 ini meningkat dari pemilihan-pemilihan sebelumnya dan

lebih besar bila dibandingkan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Tahun 2015 lalu yang hanya 62,47 %. Kemudian lebih besar dibandingkan pada Pemilihan Walikota Jambi 2013 lalu partisipasi pemilih sebesar 62,7%, artinya, terjadi peningkatan partisipasi pemilih pada pilwako tahun ini.¹¹ Peningkatan partisipasi pemilih pada Pilwako memang menjadi suatu hal yang positif bagi Kota Jambi periode 2018-2023. Berikut peneliti lampirkan data perolehan suara setiap kecamatan yang ada di Kota Jambi pada Pilwakot dan Wawako tahun 2018:

Tabel 2
Perolehan Suara Pada Pilwako-Wawako Jambi
Periode 2018-2023

N0.	Kecamatan	Jumlah Pemilih	Tingkat Partisipasi Pemilih
1.	Alam Barajo	67.050	42.526
2.	Danau Sipin	30.001	21.169
3.	Danau Teluk	9.035	7.149
4.	Jambi Selatan	37.596	26.836
5.	Jambi Timur	44.735	32.877
6.	Jelutung	40.583	28.719
7.	Kota Baru	47.784	33.029
8.	Paal Merah	64.935	45.920
9.	Pasar Jambi	8.456	5.315
10.	Pelayangan	9.188	7.083
11.	Telanaipura	32.621	21.949
	TOTAL	391.984	272.572

Sumber: KPU Kota Jambi 2018

¹¹ <http://kota-jambi-kpu.go.id/> diakses Tanggal 27 Januari 2023

Berdasarkan data tersebut tingkat partisipasi pemilih tertinggi berada di Kecamatan Paal Merah dan tingkat partisipasi pemilih terendah terdapat di Kecamatan Pasar Jambi.

Untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat pemilih di Kelurahan Eka Jaya penulis melampirkan data tabel hasil rekapitulasi suara pada Pemilihan Walikota Jambi tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 3
Data Kepemiluan Kelurahan Eka Jaya

Jenis Pemilihan	Tahun	Jumlah RT	Jumlah TPS	Mata Pilih	Tingkat Partisipasi
Pemilihan Walikota	2018	48	37	17.505	78%
Pemilihan Legislatif	2019	58	86	19.825	90,5%
Pemilihan Gubernur	2020	65	48	20.022	75,6%
Pemilihan Legislatif	2024	31	65	13,696	?

Sumber: Hasman Noviza, S.Pd Ketua PPS Eka Jaya

Keterangan: pada pemilihan 2024 mendatang Kelurahan Eka Jaya mengalami penurunan penduduk dikarenakan Kelurahan Eka Jaya masuk dalam kelurahan pemekaran yaitu 31 RT tercatat pada kelurahan Bakung jaya, dan tingkat pasrtisipasi masyarakatnya belum terprediksi sebelum terjadinya pemilihan mendatang.¹²

¹² Hasil wawancara dengan ketua PPS kelurahan Eka Jaya Hasman Noviza, S.Pd

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor pendukung Pilkada/Pilwakot adalah tingkat partisipasi yang banyak akan menunjukan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik. Meskipun jika pada akhirnya tingkat partisipasi masyarakat mengalami penurunan tidak dapat membatalkan hasil Pilkada/Pilwakot. Namun hal ini, dapat menunjukan kesadaran politik masyarakat dalam memposisikan diri sebagai unsur sentral suatu daerah. Partisipasi politik yang lemah berakibat pada sebuah realitas politik yang kini sering berkaitan dengan era otonomi daerah pada akhirnya menimbulkan kesenjangan politik antara masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan lokal, dimana faktor pelaksanaan kekuasaan lokal sering melakukan langkah pengambilan dan pelaksanaan kebijakan politik yang tidak selaras dengan aspirasi kolektif masyarakat sipil. Pada hari rabu tanggal 07 November 2018 pasangan Fasha-Maulana resmi dilantik oleh Plt Gubernur Provinsi Jambi Fachrori Umar di rumah dinas Gubernur Provinsi Jambi.¹³

Pemilihan Walikota Jambi pada Tahun 2018 menjadi sebuah fakta yang menarik untuk dilihat seberapa jauh tingkat partisipasi politik masyarakat dalam peristiwa politik tersebut, dan seberapa besar peran kepemimpinan lurah dalam pelaksanaan Pilwako untuk mempersiapkan kesiapan masyarakat dalam berpartisipasi dalam Pilwako tersebut. Pada dasarnya negara yang demokratis memiliki budaya politik masyarakat yang partisipan. Namun pada kenyataannya berbanding terbalik dalam penerapannya.

¹³JERNIH.CO.ID, Kota Jambi, <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018> diakses tanggal 15 Januari 2023, pukul.01.00 WIB

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pilkada di wilayah kota jambi, peran lurah sebagai kepala wilayah lingkup kelurahan dan fasilitator Pemilu diharapkan dapat memberikan arahan kepada masyarakat untuk turut serta dalam berpartisipasi. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan Pilwakot dan Wawako di wilayah kota jambi. Apabila partisipasi masyarakat rendah, maka kesadaran akan politik di Kota Jambi juga masih rendah, begitupun sebaliknya. Partisipasi masyarakat tentu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya dalam bentuk vertikal dan bentuk horizontal. Bentuk partisipasi secara vertikal berarti masyarakat mengikuti segala arahan dari atasannya.

Penulis menggunakan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti sebagai acuan perbandingan. Penelitian yang dilakukan oleh Hatta Ridho yang berjudul *Peran Lurah Dalam Pemilihan Umum Legislatif Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kota Tebing Tinggi (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara)*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran lurah menurut Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan pemilu lurah memiliki peran strategis dalam ketiga momentum pemilihan tersebut. Lurah sebagai fasilitator terlibat dalam dukungan teknis pada kegiatan sosialisasi, administrasi logistik, rekrutmen PPS dan sekretariat PPS, serta dalam fasilitas kantor bagi PPS. Didalam penelitian ini juga terdapat permasalahan yang sama dengan penelitian yang penulis teliti, letak persamaannya yaitu terdapatnya perdebatan yang mempertanyakan netralitas lurah dan

aparatur kelurahan dalam salah satu momentum Pilkada, yang disebabkan diantara para calon Walikota/Wakil Walikota, dua orang tersebut merupakan *incumbent* yang sedang menjabat dan memiliki hubungan struktural dengan lurah.¹⁴

Penelitian terdahulu selanjutnya juga menunjukkan pandangan dan sikap masyarakat terkait partisipasi politik yang dilakukan oleh Aida Dwi Rahmadani yang berjudul *Peran Kepemimpinan Lurah Dalam Mengembangkan Budaya Politik Di Kelurahan Gunung Simping Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap Tahun 2016* (Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepemimpinan lurah dalam mengembangkan budaya politik di Kelurahan Gunung Simping, yang menunjukkan bahwa peran kepemimpinan lurah mempunyai peran yang sangat penting untuk mengajak masyarakatnya ikut berpartisipasi mensukseskan pemilu. Dalam pelaksanaan pilkada penilaian lurah akan dilihat dari tingkat partisipasi masyarakatnya dalam menentukan pilihannya di tiap lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang mengarah pada budaya politik. Di kelurahan simping budaya politik partisipannya ditandai oleh anggota masyarakat yang aktif dalam kehidupan politik. Kesimpulannya kepemimpinan lurah memberikan peran penting untuk mengajak masyarakatnya berpartisipasi dalam menyukseskan Pilkada.¹⁵

¹⁴Hatta Ridho, *Peran Lurah Dalam Pemilihan Umum Legislatif Pemilihan Umum Presiden/ Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kota Tebing Tinggi*, Jurnal Ilmu Sosial Fakultas ISIPOL UMA, Vol.6, No.1

¹⁵Aida Dwi Rahmadani, " *Peran Kepemimpinan Lurah Dalam Mengembangkan Budaya Politik Di Kelurahan Simping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap Tahun 2016*"

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Fauzi Fadhilah yang berjudul Peran Lurah Dalam Pilkada Perspektif Fiqh Siyasah, Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat untuk memilih, jika tidak memiliki identitas maka tidak bisa menggunakan hak suaranya atau ikut memilih. Pemilihan kepala daerah dilakukan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, untuk Provinsi memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk kota memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan untuk Kabupaten memilih Bupati dan Wakil Bupati. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi langsung oleh badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Salah satu dasar hukum penyelenggara pilkada adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kepala desa tidak boleh ikut serta dalam pilkada dan dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan golongan atau organisasi tertentu. Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum, ASN atau kepala desa tidak boleh ikut kampanye yang tertulis pada Pasal 280 Undang-Undang Pemilu dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan kepala desa atau perangkat desa. Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan beberapa aspek antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Seperti adanya dugaan tindakan kecurangan yang terjadi pada pilkada tahun 2018 di kelurahan Tiuh Balak Pasar, kurangnya sosialisasi yang membuat masyarakat kurang

simpati pada pilkada. Kesimpulan penelitian, masih adanya dugaan tindakan kecurangan yang terjadi pada pilkada 2018 di kelurahan Tiuh Balak Pasar.¹⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, dan merujuk pada penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk mengembangkan penelitian terdahulu tentang kepemimpinan lurah, karena sangat menarik untuk diteliti, lurah memiliki peran penting dalam menyukseskan Pilkada, lurah sebagai fasilitator, akan tetapi lurah memiliki asas netralitas menurut Undang-Undang No.5 Tahun 2014 yang mengatur tentang ASN yang dimaksudkan “*bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh maupun tidak memihak kepada kepentingan siapapun*” dalam penyelenggaraan pemilu lurah memiliki peran strategis dalam ketiga momentum pemilihan tetapi, netralitas ASN lurah sangat dipertanyakan apabila terjadi *incumbent* yang sedang menjabat ikut serta dalam Pilkada, lurah yang memiliki hubungan struktural tentu akan berdampak terhadap partisipasi politik masyarakatnya. Disini peneliti melihat letak permasalahan yang menarik untuk diteliti mengenai peran kepemimpinan lurah terhadap partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul **“Analisis Fungsi Kepemimpinan Lurah Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Jambi Tahun 2018-2023 di Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi”**

¹⁶ Fauzi Fadhillah, ” *Peran Lurah Pada Pilkada Perspektif Fiqh Siyash* ”,

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk fungsi kepemimpinan lurah terhadap partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Eka Jaya?
2. Apakah fungsi kepemimpinan lurah dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada/Pilwako?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi kepemimpinan lurah terhadap partisipasi politik masyarakat pada Pilkada/Pilwakot Jambi 2018-2023.
2. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya fungsi kepemimpinan lurah bagi masyarakat berpengaruh atau tidak berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada atau pilwako
3. Untuk dijadikan bahan evaluasi bagi kelurahan lainnya mengenai tingkat partisipasi politik masyarakatnya agar bisa meningkat pada Pilkada/Pilwako selanjutnya

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan menjadi suatu bahan studi perbandingan untuk selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam

melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu politik, khususnya menyangkut masalah fungsi kepemimpinan lurah terhadap partisipasi politik masyarakat pada Pilwakot Jambi Tahun 2018-2023 di Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu masukan bagi masyarakat sebagai bahan evaluasi terhadap partisipasi politik dalam Pemilu pada tahun berikutnya dan sebagai model perbandingan untuk masyarakat di kelurahan lainnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam partisipasi politik pada Pilkada berikutnya.

1.5. Landasan Teori

Teori menjadi payung peneliti dalam menganalisis masalah yang ditemukan di lapangan. Sejumlah teori akan mendeskripsikan indikator dan mengidentifikasi masalah serta alat untuk memecahkan masalah di lapangan sesuai dengan variabel dan topik penelitian. Berikut sejumlah teori yang penulis gunakan:

1.5.1. Partisipasi Politik

Menurut para ahli konsep pengertian partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan. Partisipasi politik merupakan kegiatan masyarakat yang bertujuan mempengaruhi pengambilan suatu keputusan politik. Adapun partisipasi politik tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang

yang posisinya sebagai warga negara, bukan sebagai pejabat publik ataupun pegawai negeri sipil. Partisipasi politik bersifat sukarela, tidak dimobilisasi oleh negara maupun partai penguasa.¹⁷

Ruang bagi partisipasi politik adalah sistem politik. Dalam hal ini sistem politik berpengaruh untuk menuai perbedaan dalam pola sebuah partisipasi politik warga negaranya. Partisipasi politik ini juga merupakan salah satu aspek penting dari sebuah demokrasi. Adapun asumsi yang mendasari sebuah demokrasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. sebab keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah itu menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk ikut serta menentukan isi sebuah keputusan yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat terkait keikutsertaan nya dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Adapun kegiatan masyarakat itu terbagi menjadi dua, yaitu mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut dalam menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik.¹⁸

Partisipasi politik itu ditujukan kepada aktivitas masyarakat (warga negara) untuk turut memikirkan kehidupan negara. Terdapat dua subjek dalam kegiatan partisipasi politik yaitu pemilihan penguasa

¹⁷ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 141-142

¹⁸ *Ibid*, hlm. 142-143

dan pelaksanaan segala kebijaksanaan penguasa (pemerintah) berikut beberapa kriteria dari partisipasi politik:

- a) Menyangkut kegiatan-kegiatan yang dapat diamati dan bukan sikap atau orientasi. Jadi, partisipasi politik hanya berhubungan dengan hal yang bersifat objektif dan bukan subjektif.
- b) Kegiatan politik suatu masyarakat atau individu sebagai warga negara biasa yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung (perantara).
- c) Kegiatan tersebut mempunyai tujuan untuk memengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan, bisa berupa bujukan ataupun dalam bentuk tekanan, termasuk juga penolakan kepada keberadaan figur para pelaku politik dan pemerintah.
- d) Kegiatan tersebut ditujukan pada upaya memengaruhi pemerintah tanpa peduli efek yang akan timbul gagal ataupun berhasil.
- e) Kegiatan yang dilaksanakan itu dapat melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan (konvensional) ataupun dengan cara yang di luar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (*violence*).
- f) Partisipasi politik adalah kegiatan suatu individu atau sekelompok orang untuk ikut aktif dalam sebuah kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya memengaruhi kebijakan pemerintah.

Partisipasi politik lebih dialamatkan pada aktivitas masyarakat ikut serta dalam memikirkan kehidupan negara. Kegiatan partisipasi politik tertuju pada subjek, yaitu: pemilihan penguasa, dan pelaksanaan segala kebijaksanaan penguasa (pemerintah).

Bentuk partisipasi politik terhadap subjek kedua sangat beragam atau bersifat *heterophulus*, yaitu bergantung pada latar belakang pendidikan, kualitas rujukan status sosial yang berada pada individu atau kelompok. Partisipasi politik merupakan cerminan dari sikap politik (*political behaviour*) warga negara yang berwujud pada perilaku, baik secara psikis maupun fisik.¹⁹

Partisipasi politik yang dikehendaki adalah partisipasi yang tumbuh atas kesadaran sebagai partisipasi murni (*pure participation*) tanpa adanya paksaan.²⁰ Pada negara-negara totaliter, partisipasi politik dipola menurut kebijakan elit yang berkuasa (elite pemerintah, elite partai). Partisipasi semacam ini dimobilisasikan untuk tujuan ideologi (ideologi *Marxis* atau komunisme). Terwujudnya partisipasi murni menunjukkan bahwa jalinan komunikasi antar elite infrastruktur (elit penguasa) dengan jalinan harmonis untuk mewujudkan partisipasi murni, masyarakat harus lengkap dan cukup menerima pesan komunikasi (termasuk transformasi nilai-nilai) dan informasi tentang

¹⁹ *Ibid*, hlm.145

²⁰ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia,2013), hlm. 141-142

langkah kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.²¹

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson mendefinisikan:

“Partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan suatu keputusan oleh pemerintah. Partisipasi ini bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif”.

Partisipasi politik adalah suatu kegiatan seseorang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).²²

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat sebagai berikut:²³

- a) Kesadaran Politik;
- b) Kepercayaan Terhadap Pemerintah;
- c) Status Sosial;
- d) Status Ekonomi.

Upaya yang dilakukan lurah untuk mengantisipasi rendahnya partisipasi masyarakat di Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi sebagai berikut:²⁴

- a) Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (kontribusi kerjasama lurah dengan pihak KPU Provinsi Jambi dalam mensosialisasikan pentingnya suara dari masyarakat);

²¹ Ibid, hlm.145

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.367

²³ Raju Pangestu, DKK, “Analisis Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2020”, JISIP UNJA, Vol. 4, No.2, hlm. 85-86

²⁴ Ibid, hlm. 87-88

- b) Membentuk Relawan Demokrasi (tugas peran lurah sebagai fasilitator);
- c) Peran Media Massa.

Pada dasarnya, cara mengukur partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat. Artinya dalam hal apa saja masyarakat tersebut melibatkan diri dalam kegiatan politik. Bentuk yang dipilih oleh masyarakat untuk melibatkan diri dalam kegiatan politik beranekaragam, seperti aktivitas individu dalam kegiatan pemilihan umum, melakukan lobi politik, aktif dalam berorganisasi sosial serta berusaha membangun jaringan politik.

Pengukuran partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari bentuk-bentuk partisipasi politik yang diikuti, diantaranya adalah:

a. Partisipasi Vertikal

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain dalam hubungan antara masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.

b. Partisipasi Horizontal

Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa untuk ikut dalam berpartisipasi horizontal satu dengan yang lain. Bagi individu secara pribadi, partisipasi politik bertujuan mengembangkan kepribadian politik (*political personality*) yang memiliki dasar moral berdasarkan norma dan nilai-nilai yang

memedomani terhadap sikap perilaku sebagai warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab.

1.5.2. Teori Kepemimpinan

Dalam teori kepemimpinan ada beberapa hal yang perlu di perhatikan,di antaranya: pertama, kekuasaan dan kewenangan,yaitu kemampuan untuk bertindak bagi seorang pemimpin untuk menggerakkan bawahannya agar mengikuti kehendaknya dalam mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. Kedua, kewibawaan,yaitu berbagai keunggulan yang dimiliki seorang pemimpin, sehingga membedakan dengan yang di pimpinnya,dan dengan keunggulan tersebut, orang lain patuh dan bersedia melakukan dalam kegiatan-kegiatan yang dikehendaknya. Ketiga, kemampuan,yaitu keseluruhan daya,baik berupa keterampilan sosial maupun keterampilan teknis yang melebihi orang lain.

Dalam menjalankan kepemimpinannya dan mencapai tujuan yang diinginkan,maka seorang pemimpin harus memiliki. Teknik kepemimpinan, karena dengan taknik kepemimpinan itulah yang akan menunjukan bahwa ia mampu untuk memimpin dan merupakan pencerminan jati dirinya sebagai seorang pemimpin. Teknik merupakan cara atau strategi yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan segera tercapai sesuai dengan kemampuan pemimpin pemerintahan itu sendiri.

Pemimpin adalah sosok yang paling bertanggung jawab untuk mengantarkan sebuah organisasi mencapai visi dan misi melalui sistem atau cara kerja yang paling efektif. Menurut Kartini Kartono mengatakan bahwa:

“Pemimpin dalam pengertian luas ialah seorang yang pimpin, dengan jelas memprakarsai tingkah laku atau mengontrol usaha atau upaya orang lain atau posisi. Dalam pengertian terbatas, pemimpin adalah seorang yang membimbing dengan bantuan-bantuan kualitas persuasifnya dan ekseptensi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya.”²⁵

“Selanjutnya menurut R.J.Burby mengatakan bahwa yang di maksud dengan pemimpin adalah orang yang oleh kata atau Tindakan mendorong orang-orang untuk mengikuti dengan sukarela”.

Dari uraian beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat diketahui bahwa pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lain agar mengikutinya dengan sukarela sedangkan kepemimpinan merupakan sifat seorang pemimpin untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lain. Sementara kepemimpinan merupakan inti manajemen, karena kepemimpinan merupakan motor atau daya penggerak semua sumber-sumber dan alat-alat (*resources*) yang tersedia dalam suatu organisasi.

Sebagaimana yang di katakan oleh Miftah Thoha mengenai bahwa kepemimpinan adalah kegiatan untuk memengaruhi perilaku

²⁵ Kartini, Kartono, “*Pemimpin dan Kepemimpinan*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2008

orang lain, atau seni mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi manusia baik perorangan maupun kelompok.²⁶

Fungsi Kepemimpinan menurut Pasalong ada 4 (empat) fungsi manajemen yang juga merupakan fungsi kepemimpinan yaitu:²⁷

1. Fungsi perintah, merupakan fungsi kepemimpinan yang bersifat satu arah kepada yang dipimpin;
2. Fungsi konsultatif merupakan fungsi kepemimpinan yang bersifat dua arah kepada yang dipimpinnya, meskipun pelaksanaannya sangat bergantung pada pihak pemimpin;
3. Fungsi partisipatif yaitu fungsi kepemimpinan yang bersifat dua arah kepada pemimpinnya, tetapi juga berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif antara pemimpin dan yang dipimpin;
4. Fungsi delegasi yaitu fungsi pemimpin untuk mendelegasikan wewenang untuk membuat, menetapkan, dan atau melaksanakan keputusan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pimpinan.

Undang-undang No.5 Pasal 2 Tahun 2014 mengenai asas netralitas ASN disebutkan bahwa: “setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh maupun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun”

Dimensi netralitas ASN terletak pada pelaksanaan pemilu, penyelenggaraan pelayanan publik, pembuatan keputusan/ kebijakan, dan manajemen ASN. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan. Kepala kelurahan disebut sebagai lurah. Lurah diangkat dari PNS yang memenuhi syarat oleh bupati atau walikota atas usul camat. Syarat-syarat menjadi seorang lurah tercantum dalam peraturan

²⁶ Thoha, Miftah, “Kepemimpinan dan Manajemen”, Devisi Buku Perguruan, Tahun 2014

²⁷ Dedy Afrizal, Dkk, “Fungsi Instruktif, Konsultatif, partisipatif dan Delegasi Dalam Melihat Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis”. Jurnal JAPS, Vol.1, No.1

pemerintah No.73 Tahun 2005 tentang Kelurahan pada Pasal 3 sebagai berikut:²⁸

1. Memiliki pangkat atau golongan minimal penata (III atau C);
2. Memiliki masa kerja minimal 10 tahun;
3. Memiliki kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Lurah menurut Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 pada Pasal 1 ayat (12) yang berbunyi, “Lurah adalah pimpinan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintahan Daerah Kota Jambi”.²⁹

Kepemimpinan Lurah mengenai tugas pokok Lurah yang tercantum dalam peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kelurahan pada pasal 1 yang berbunyi:³⁰

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
2. Memimpin dan membina;
3. Pengendalian, pengawasan, dan evaluasi;
4. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam perumusan dan penyusunan perencanaan pemberian pelayanan umum pemerintahan kelurahan berdasarkan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Peran lurah dalam Pilkada sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada;
2. Menginventarisasikan dan mengantisipasi permasalahan Pilkada;
3. Memberikan saran dalam penyelesaian masalah Pilkada;

²⁸ Undang-Undang No.73 Tahun 2005

²⁹ Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (12)

³⁰ Undang-Undang No. 14 Tahun 2016

4. Melakukan laporan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan, persiapan, dan pelaksanaan pilkada secara berjenjang atau bertahap setiap hari.

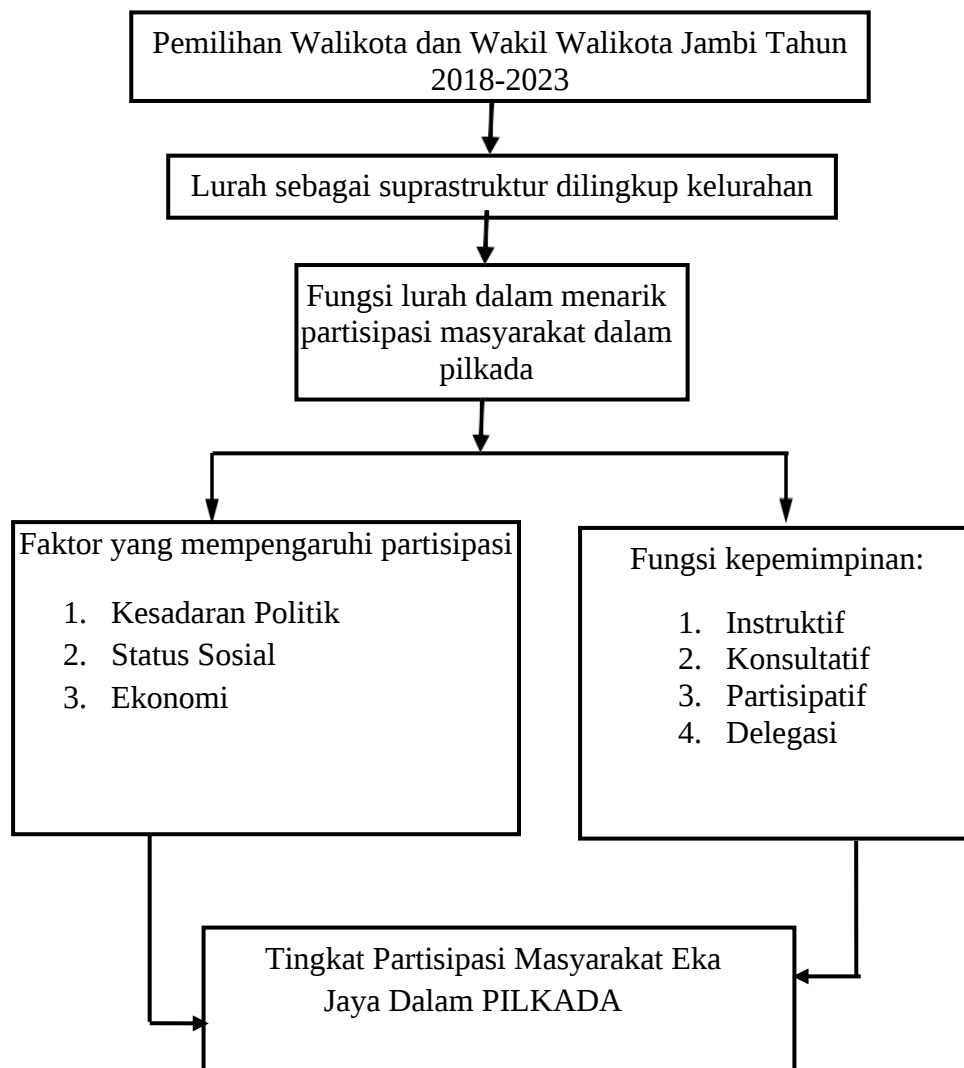
Selain dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dalam Perda Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dalam hal pelimpahan tugas dari Walikota kepada lurah, maka pemerintah Kota perlu memverifikasi tugas-tugas yang dilimpahkan secara proposional. Melihat dari tugas pokok lurah diatas, kepemimpinan Lurah merupakan proses mempengaruhi atau mengkoordinasikan seseorang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayah kerja Kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan.

1.6. Kerangka Berpikir

Untuk mempermudah peneliti dalam rangka Menyusun dan menjelaskan maksud serta tujuan penelitian ini, maka diperlukan suatu kerangka pikir yang mampu dijadikan sebagai pedoman dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti.

Kerangka pemikiran meyangkut konsepsi tahap-tahap penelitian yang secara teoritis dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat alur dari proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian. Berikut adalah kerangka pikir pada penelitian ini.

Analisis Fungsi Kepemimpinan Lurah Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Jambi Tahun 2018-2023 di Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.



1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan dasar keilmuan.

³¹ Dasar keilmuan yang dimaksud adalah rasional, empiris, dan sistematis.

³¹Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung Alfabeta, 2013, Hlm.2

“Rasional merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh nalar manusia. Empiris berarti cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.”³²

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini peneliti anggap tepat untuk mencari data guna menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat. Peneliti beranggapan melalui metode ini, akan membawa peneliti mengetahui fenomena secara kompleks, dan menyeluruh yang pada akhirnya didapatkan data terperinci dari suatu permasalahan yang diteliti terkait dengan Analisis Fungsi Kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilwakot Jambi di Kecamatan Paal Merah Kelurahan Eka Jaya Kota Jambi.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan langkah kerja untuk mendeskripsikan, atau menggambarkan suatu objek, fenomena dalam bentuk narasi maupun deskripsi kata-kata tertulis atau lisan dari sejumlah orang yang diamati.³³

“Creswell mendefinisikan metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan

³²*Ibid*

³³ Djam'an Satori dan Aan Komariah. Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta Bandung, 2009. Hlm.28.

pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.”³⁴

Pendekatan ini digunakan oleh peneliti karena dengan metode ini permasalahan dapat digambarkan dengan jelas dan terperinci mengenai Analisis Fungsi kepemimpinan lurah terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi pada Tahun 2018-2023 di Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, sehingga peran lurah sebagai fasilitator Pilwakot dapat dijadikan pedoman penunjang tingkat partisipasi politik masyarakat.

1.7.2. Lokasi / Objek Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan meninjau keadaan lapangan yang sebenarnya terjadi untuk mendapatkan data dari objek yang diteliti. Adapun lokasi penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena Kelurahan Eka Jaya bagian dari Kecamatan Paal Merah yang sesuai data KPU provinsi Jambi dimana tingkat partisipasi masyarakatnya dalam Pilwakot terhitung tinggi. Sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis peran kepemimpinan lurah sebagai fasilitator Pilwakot berhasil atau tidak dalam memberikan pelayanan

³⁴John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), Hlm. 4-5

kepada masyarakat untuk turut serta dalam berpartisipasi dalam ranah politik dalam menentukan seorang pemimpin yang di dambakan.

1.7.3. Fokus Penelitian

Untuk fokus penelitian yang diambil oleh peneliti gunakan teori Spradeley dan Sugiyono yang menyatakan bahwa fokus merupakan dominan tunggal atau beberapa dominan yang terkait situasi sosial.³⁵ Fokus penelitian yang peneliti teliti adalah fungsi kepemimpinan lurah terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi pada periode 2018-2023 di Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah untuk melihat dan menganalisis fungsi lurah sebagai fasilitator yang menyukkseskan Pilkada/Pilwakot dengan cara melihat antusias masyarakat dalam berpartisipasi politik untuk menentukan sosok pemimpin yang akan menduduki jabatan Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Tahun 2018-2023 dikota Jambi.

1.7.4. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu:

a) Data Primer

Data primer meruapakan data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik perilaku yang

³⁵Ibid. Hlm.24

dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya.³⁶ Diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan membutuhkannya. Data primer disebut juga sumber data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian dilapangan seperti wawancara dengan narasumber. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah setiap sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan yang disertai dengan dokumentasi bersama narasumber penelitian.

b) Data sekunder

Bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu peneliti menggunakan Teknik dokumentasi, maka catatan (data) yang diperoleh menjadi sumber data, atau dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber data berupa media cetak, peraturan pemerintah, dan Undang-Undang.³⁷

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan adalah metode yang digunakan atau yang dipakai oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapakah yang akan dijadikan sumber data. Dalam hal ini penelitian kualitatif tidak mengenal sampel, maka penentuan informan dilakukan berdasarkan keterlibatan seorang dengan objek penelitian yang akan diteliti. Data

³⁶Jhonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Hlm.209.

³⁷ *Ibid*, Hlm.230

primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara pada narasumber dan meninjau langsung pada lokasi penelitian.

Teknik penentuan informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan Teknik purposive sampling yang menurut “Sugiyono adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.”³⁸ Dalam penelitian ini penentuan informan yang dimaksudkan ialah penentuan orang yang dianggap benar-benar mengerti atau orang yang terlibat langsung dalam permasalahan penelitian.

Pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Table 4

Data Informan

JABATAN NARASUMBER TERKAIT	NAMA NARASUMBER TERKAIT
1. Lurah Kelurahan Eka Jaya	Abdul Salim
2. Sekretaris Lurah Eka Jaya	Erwin Taruna, S.E.
3. Kasih Kelurahan Eka Jaya	Ratna Sari, S.E.
4. Ketua RT Eka Jaya	Samio Edi
5. Ketua KPPS	Hasman Noviza, S.Pd
6. Masyarakat	Emi Yanti

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

³⁸Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Jakarta: Alfabeta, 2016), Hlm.85

mendapatkan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Wawancara mendalam penulis pilih karena dalam pelaksanaannya lebih bebas untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, pihak yang menjadi subjek/objek yang diajak wawancara oleh penulis dapat diminta pendapat, pengamatan, dan penjelasan secara mendalam mengenai masalah yang akan diteliti.³⁹

Metode dokumentasi ini pada intinya digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa foto, arsip-arsip disinggung mendukung penelitian, seperti dokumen pribadi, bisa berupa catatan tindakan serta pengalaman dan dokumen resmi.⁴⁰ Melalui dokumentasi, diharapkan dapat membantu menjawab rumusan masalah mengenai Analisis Fungsi Kepemimpinan Lurah Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Walikota Jambi Tahun 2018-2023 di Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1.7.7. Teknik Analisis Data

Mengutip Sugiyono, “dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh”.⁴¹ Dengan pengamatan yang terus menerus

³⁹ Ibid, Sugiyono, Hlm. 224.

⁴⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada 2012), Hlm. 125.

⁴¹ Sugiyono, Op.Cit. Hlm.243

mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Untuk itu perlu adanya sebuah teknik untuk menganalisis data tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik analisis data yakni reduksi data, penyajian data dan konklusi atau penarikan kesimpulan.

Reduksi data, “data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu diperlukan dicatat secara teliti dan rinci”.⁴² “Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya”.⁴³ Dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan.

Penyajian data, Setelah proses data di reduksi, maka langkah berikutnya adalah menyajikan data. Data temuan di lapangan dianalisis dan disajikan dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif, bagan, flowchart, gambar dan sebagainya. Langkah terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau konklusi.

1.7.8. Keabsahan Data

Triangulasi menjadi sangat penting dalam penelitian kualitatif, triangulasi dapat meningkatkan kedalaman pemahaman penulis baik mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks di mana fenomena itu muncul. “kan dari berbagai Triangulasi sebagai pengujian data yang

⁴² Ibid, Hlm. 247

⁴³ Refi Nanda. Op.Cit, Hlm.26

bersifat menggabung teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Dengan triangulasi, penulis mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data”.⁴⁴ Teknik pengumpulan data, penulis menganalisis beragam data primer maupun sekunder untuk akan mendapatkan hasil yang valid dan kredibel.

- a. Triangulasi Data, yaitu penggunaan beragam sumber data dalam suatu penelitian.
- b. Triangulasi Peneliti, yaitu penggunaan beberapa peneliti yang berbeda ilmunya dalam suatu penelitian disiplin.

⁴⁴ Sugiyono, Op.Cit. Hlm. 211